



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011  
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11  
TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012  
semula berjumlah Rp.3.656.633.235.145,91 bertambah sejumlah  
Rp.446.025.033.181,34 sehingga menjadi Rp.4.102.658.268.327,25  
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp.3.249.750.720.781,00

2. Bertambah Rp. 148.595.907.034,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp.3.398.346.627.815,00

b. Belanja

1. Semula Rp.3.656.633.235.145,91

2. Bertambah Rp. 446.025.033.181,34

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp.4.102.658.268.327,25

(Defisit) setelah Perubahan Rp.(704.311.640.512,25)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 456.882.514.364,91

b) Bertambah Rp. 330.429.126.147,34

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 787.311.640.512,25

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 50.000.000.000,00

b) Bertambah Rp. 33.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 83.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 704.311.640.512,25

3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkeenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 1.751.375.903.175,00

2. Bertambah Rp. 113.193.825.862,53

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 1.864.569.729.037,53

b. Dana perimbangan

1. Semula Rp. 852.217.764.758,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. \_\_\_\_\_,00

Jumlah dana perimbangan

setelah Perubahan Rp. 852.217.764.758,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 646.157.052.848,00

2. Bertambah Rp. 35.402.081.171,47

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 681.559.134.019,47

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula Rp. 1.595.931.327.150,00

2. Bertambah Rp. 96.192.347.180,70

Jumlah pajak daerah

setelah Perubahan Rp. 1.692.123.674.330,70

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp. 34.144.911.470,00

2. Bertambah Rp. 14.172.780.591,00

Jumlah retribusi daerah

setelah Perubahan Rp. 48.317.692.061,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 73.250.204.555,00

2. Bertambah Rp. 3.063.298.090,83

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 76.313.502.645,83

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp. 48.049.460.000,00

2. Bertambah/

Berkurang Rp. (234.600.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan

asli daerah setelah Perubahan Rp. 47.814.860.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 124.112.774.758,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil

setelah Perubahan Rp. 124.112.774.758,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp. 694.079.080.000,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum  
setelah Perubahan Rp. 694.079.080.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp. 34.025.910.000,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah Perubahan Rp. 34.025.910.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula Rp. 29.781.565.700,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. ,00

Hibah setelah perubahan Rp. 29.781.565.700,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 139.251.878.000,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. 14.185.376.151,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya setelah Perubahan Rp. 153.437.254.151,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 388.639.310.000,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. 993.000.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 389.632.310.000,00

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula                    | Rp. 88.484.299.148,00        |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>Rp. 20.223.705.020,47</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari  
Provinsi atau pemerintah daerah lainnya  
setelah Perubahan Rp. 108.708.004.168,47

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 2.372.921.201.442,91      |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 284.870.877.495,99</u> |
- Jumlah belanja tidak langsung  
setelah Perubahan Rp.2.657.792.078.938,90
- b. Belanja Langsung
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 1.283.712.033.703,00      |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 161.154.155.685,35</u> |
- Jumlah belanja langsung  
setelah Perubahan Rp. 1.444.866.189.388,35
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 779.639.483.934,40          |
| 2. Berkurang | <u>Rp. ( 78.011.012.822,37)</u> |
- Jumlah belanja pegawai  
setelah Perubahan Rp. 701.628.471.112,03
- b. Belanja Subsidi
- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula    | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>      |
- Jumlah belanja subsidi  
setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,00

- c. Belanja Hibah
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 744.942.852.879,00       |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 88.447.251.000,00</u> |
- Jumlah belanja hibah  
setelah Perubahan Rp. 833.390.103.879,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 27.957.760.000,00         |
| 2. Berkurang | <u>Rp. (1.400.260.000,00)</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial  
setelah Perubahan Rp. 26.557.500.000,00
- e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan  
Pemerintah Desa
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 680.261.434.545,00        |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 181.540.742.502,74</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil  
setelah Perubahan Rp. 861.802.177.047,74
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota/  
Pemerintah Desa dan Partai Politik
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 106.699.649.000,00       |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 88.445.312.000,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah Perubahan Rp. 195.144.961.000,00
- g. Belanja Tidak Terduga
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 29.420.021.084,51       |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 5.848.844.815,63</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga  
setelah Perubahan Rp. 35.268.865.900,14

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 53.454.514.150,00         |
| 2. Berkurang | <u>Rp. (6.532.700.900,00)</u> |
- Jumlah belanja pegawai  
setelah Perubahan Rp. 46.921.813.250,00

- b. Belanja Barang dan Jasa
- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula                      | Rp. 772.160.232.072,00        |
| 2. Bertambah                   | <u>Rp. 128.249.436.985,35</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa |                               |
| setelah Perubahan              | Rp. 900.409.669.057,35        |
- c. Belanja Modal
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Semula            | Rp. 458.097.287.481,00       |
| 2. Bertambah         | <u>Rp. 39.437.419.600,00</u> |
| Jumlah belanja modal |                              |
| setelah Perubahan    | Rp. 497.534.707.081,00       |

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Semula         | Rp. 456.882.514.364,91        |
| 2. Bertambah      | <u>Rp. 330.429.126.147,34</u> |
| Jumlah penerimaan |                               |
| setelah Perubahan | Rp. 787.311.640.512,25        |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Semula          | Rp. 50.000.000.000,00        |
| 2. Bertambah       | <u>Rp. 33.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran |                              |
| setelah Perubahan  | Rp. 83.000.000.000,00        |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. SiLPA tahun anggaran
- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula                    | Rp. 372.409.786.364,91        |
| 2. Bertambah                 | <u>Rp. 330.429.126.147,34</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran  |                               |
| sebelumnya setelah Perubahan | Rp. 702.838.912.512,25        |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>33.000.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal

(investasi) daerah setelah Perubahan Rp. 83.000.000.000,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan
  - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu suatu kegiatan dan atau/belanja harus dilaksanakan akan tetapi tidak tersedia anggarannya.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 September 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 7